

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

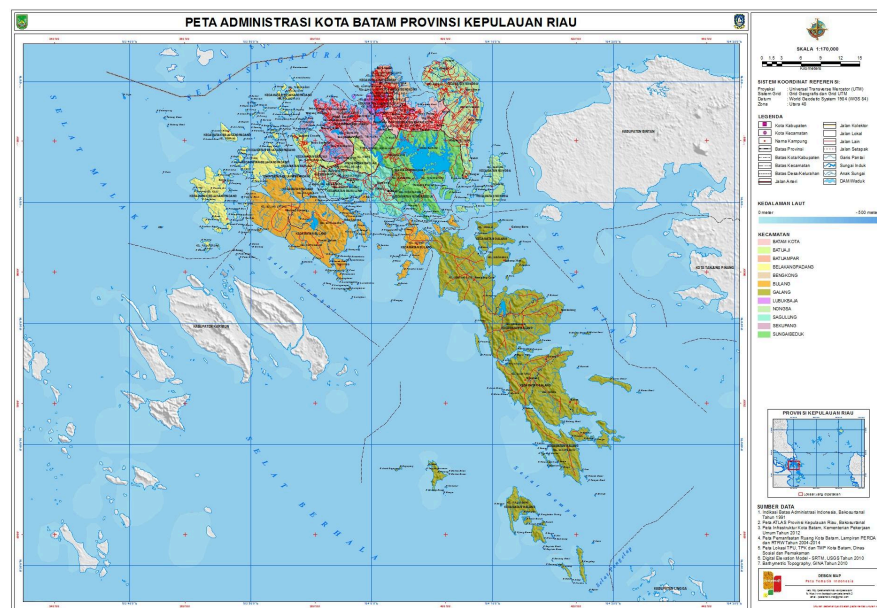
2.1 Gambaran Umum Kota Batam

Kota Batam merupakan kota industri dengan luas wilayah 1.570,35 kilometer persegi, meliputi 715 kilometer persegi daratan. Pada era 1970-an, Kota Batam sebagian besar ditutupi oleh hutan, namun sejak tahun 1974 luas wilayah ini terus menyusut akibat pembangunan industri dan perluasan infrastruktur perkotaan, termasuk kawasan pesisir yang telah dialihfungsikan menjadi lokasi reklamasi. Perubahan ini terjadi karena seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai kawasan industri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Di dalam Kota Batam, terdapat tiga pulau besar yang dihubungkan oleh Jembatan Barelang, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Selain ketiga pulau tersebut, terdapat beberapa pulau lainnya, yaitu Pulau Belakang Padang dan Pulau Bulang. Batas wilayah Kota Batam merupakan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Singapura; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Senayang; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun.

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan sangat pesat. Jumlah penduduk Kota Batam tercatat sebanyak 1,196 juta jiwa menurut sensus terakhir tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk tersebut mengalami penurunan sebesar 2,32% dibandingkan dengan periode sensus tahun 2010 yang mencatat kenaikan sebesar 7,64%. Kota Batam memiliki

persentase penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 70,31%, menurut data Badan Pusat Statistik Kota Batam tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa Kota Batam masih berada pada fase bonus demografi. Jumlah industri di Kota Batam tercatat mencapai kurang lebih 1.309 industri, dan perkembangan industri mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kota Batam terbagi dalam 12 kecamatan, yaitu Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Belakang Padang, Bengkong, Bulang, Galang, Lubuk Baja, Nongsa, Sungai Beduk, Sagulung, dan Sekupang.

Gambar 5. Peta Kota Batam



Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2024

Sebagai daerah yang mendapatkan berbagai kebijakan khusus, Batam sering mengalami tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam

(Pemko Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (dulu dikenal sebagai Otorita Batam). Dualisme kewenangan ini muncul terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah, yang menjadikan Batam sebagai kota otonom dengan pemerintahannya sendiri. Sementara itu, Badan Pengusahaan Batam memiliki kewenangan khusus yang sudah ada sejak awal pengembangan Pulau Batam, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan investasi. Pemerintah Kota Batam bertanggung jawab atas administrasi umum, perizinan, pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, dan hal-hal lain yang menjadi kewajiban pemerintah daerah menurut undang-undang otonomi daerah. Sementara itu, BP Batam bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan industri, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan lahan yang dikhususkan untuk kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. BP Batam memiliki wewenang khusus yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat.

Visi Kota Batam tahun 2021-2026 merupakan mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Batam menetapkan beberapa misi utama. Pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian yang berbasis pada keunikan dan keunggulan wilayah. Kedua, mengembangkan pembangunan kota yang berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, serta nyaman sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki budaya produktif, dan berakhlak mulia. Keempat, melanjutkan percepatan pembangunan

di daerah hinterland untuk memastikan pemerataan dan mendukung perekonomian Kota Batam secara keseluruhan. Terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien dengan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Visi BP Batam “Memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, BP Batam memiliki Misi, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing investasi di KPBPB Batam dalam rangka mendukung struktur ekonomi produktif, mandiri, dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kapasitas BP Batam sebagai pengelola KPBPB yang bersih, efektif, dan terpercaya.

2.2 Rempang Eco-City

Rempang Eco-City merupakan program pembangunan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi ekonomi di kawasan Rempang dengan fokus pada sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Program ini diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional 2023 dan dikelola oleh PT Makmur Elok Graha. Pembangunan Rempang Eco-City diproyeksikan melibatkan investasi yang signifikan, dengan nilai mencapai Rp. 381 triliun hingga tahun 2080. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan tersebut sehingga sejajar dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam,

Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah 16.583 hektare dan terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang, dengan jumlah penduduk sekitar 7.935 jiwa pada tahun 2022.

Gambar 6. Ilustrasi Rempang Eco-City



Sumber: *asiatoday.id* (2023)

Rempang Eco-City merupakan proyek pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan yang berlokasi di Pulau Rempang, Batam, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kota hijau berbasis teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Proyek ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk menciptakan kota masa depan yang tidak hanya mengedepankan aspek pembangunan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Rempang Eco-City direncanakan untuk menjadi pusat investasi dan inovasi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Batam dan wilayah sekitar, sekaligus meningkatkan daya saing global Indonesia dalam sektor investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 7. Peta Zonasi Pengembangan Rempang Eco-City



Sumber: Kompas Indonesia, 2023

Pengembangan Rempang Eco-City akan dibagi menjadi tujuh zona berbeda, yaitu *Rempang Integrated Industrial Zone*, *Rempang Integrated Agro-Tourism Zone*, *Rempang Integrated Commercial and Residential*, *Rempang Integrated Tourism Zone*, *Rempang Forest and Solar Farm Zone*, *Wildlife and Nature Zone*, dan *Galang Heritage Zone*. Program ini diharapkan dapat mendorong Batam menjadi lokomotif perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, mengingat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau tengah menunjukkan tren positif. Fase pertama pembangunan akan mencakup

lahan seluas 2.300 hektare, di mana akan dibangun kawasan industri terintegrasi. Proyek ini akan berdampak pada lima desa, yaitu Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu.

Proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor swasta, dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai pengelola utama kawasan ini. Dalam pengembangannya, proyek ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian ATR/BPN yang mengatur aspek tata ruang dan legalitas pertanahan. PT. Makmur Elok Graha (PT. MEG) bertindak sebagai investor utama yang berkomitmen untuk membiayai tahap awal pembangunan dengan nilai investasi yang signifikan. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan besar terkait dengan dampak sosial, termasuk relokasi warga yang terdampak pembangunan dan ketegangan sosial yang muncul di kalangan masyarakat lokal.

Seiring dengan ambisi besar yang diusung, Rempang Eco-City juga dihadapkan pada berbagai kontroversi, terutama terkait dengan proses relokasi masyarakat setempat dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal, yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam setempat, merasa terpinggirkan dan khawatir akan hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meskipun sebagian besar warga telah relokasi sesuai dengan program pemerintah, sebagian kecil masyarakat memilih untuk tetap tinggal, yang menambah kompleksitas

proyek ini. Pembangunan Rempang Eco-City memerlukan perhatian ekstra dalam hal komunikasi dengan masyarakat, transparansi kebijakan, dan pengelolaan dampak sosial untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek ini.

Pembangunan ini direncanakan untuk menjadi kawasan perkotaan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Kelurahan Sembulang menjadi titik awal pengembangan Rempang Eco-City karena posisinya yang strategis dan keterkaitannya dengan sejumlah infrastruktur yang akan mendukung perkembangan proyek ini. Pada tahap pertama, proyek ini berfokus pada relokasi warga yang tinggal di sekitar area yang akan dijadikan kawasan pembangunan.

Meskipun sebagian besar masyarakat sudah mengikuti program relokasi yang disediakan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), masih ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di Pulau Rempang. Hal ini menunjukkan adanya keragaman respon dari masyarakat terhadap pembangunan ini. Relokasi ini mencakup pemindahan warga ke rumah relokasi yang disediakan di wilayah Tanjung Banun, di mana fasilitas kesehatan dan pendidikan juga dipindahkan dari Pulau Rempang ke lokasi baru.

Pembangunan bertahap ini mengutamakan pengembangan infrastruktur dasar, seperti penyediaan layanan publik, akses jalan, dan fasilitas umum. Tahap pertama ini bertujuan untuk mempersiapkan daerah yang lebih luas untuk pembangunan lebih lanjut yang melibatkan pembangunan perumahan, kawasan komersial, serta ruang terbuka hijau. Keberhasilan pembangunan tahap pertama

akan menjadi landasan untuk kelanjutan proyek, yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi melalui berbagai sektor, termasuk teknologi, pendidikan, dan pariwisata.

Meskipun demikian, proyek ini juga menghadapi tantangan dalam hal komunikasi dan transparansi. Protes dan ketidakpuasan dari sebagian masyarakat setempat mengenai proses relokasi dan dampak sosial pembangunan menunjukkan pentingnya adanya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan. Keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi seluruh pihak terkait, termasuk warga yang terdampak.